

Kebijakan Publik

Kasus No.7: Dilema Penanganan Sampah di kota Bandung

Salah satu kota di Indonesia yang memiliki masalah paling serius dengan sampah adalah kota Bandung. Berbeda dengan satu abad silam yang menempatkan kota Bandung sebagai Paris van Java yang sejuk dan nyaman, kini selain diliputi oleh persoalan kemacetan lalu lintas di seluruh kota yang parah kota ini dililit masalah sampah. Produksi sampah dari warga kota terus menumpuh hingga 550.000 meter kubik yang tidak terangkut karena warga rata-rata menghasilkan sampah sekitar 7.500 meter kubik per hari. Praktis, tidak ada satu pun ruang publik yang terlepas dari sampah. Masalah pengangkutannya menjadi persoalan tersendiri.

Masalah sampah di Bandung bahkan sempat mengakibatkan presiden SBY gusar. Ketika mengikuti lomba maraton di lapangan Tegalega, awal tahun 2006, SBY bersama rombongan menteri benar-benar ikut merasakan betapa rumitnya masalah sampah di kota ini. SBY bahkan sempat menyampaikan ultimatum kepada Walikota Dada Rosada. Selain mengutus Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menangani sampah secara terpadu, dia mengultimatum walikota agar dalam kunjungan selanjutnya pada bulan Juni 2006, sampah di Bandung sudah dapat ditangani.

Tetapi persoalan sampah di Bandung memang tidak sederhana. Warga sudah telanjur memiliki perilaku yang skeptis terkait sampah. Tidak ada insentif apapun untuk mengurangi produksi sampah. Kecuali itu, penanganan sampah sejauh ini selalu menggunakan pendekatan berupa *open dumping*, sampah dikumpulkan ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) untuk kemudian ditumpuk hingga hancur sendiri di TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Masalahnya adalah bahwa pendekatan penanganan dengan cara seperti ini sudah tidak memadai lagi dengan adanya volume sampah yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Prediksi kasar menunjukkan bahwa dengan cara penanganan seperti ini, jika seluruh kawasan Bandung Raya (kota Bandung, Kabupaten Bandung, kota Administratif Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang) memproduksi sampah, total volumenya mencapai 4,5 juta ton kubik per hari. Dengan menggunakan cara *open dumping*, diperkirakan bahwa dalam waktu 25 tahun diperlukan 100 hektare tanah sebagai lokasi TPA.

Sementara itu, konflik mengenai masalah sampah di kota Bandung juga sudah menelan korban jiwa di kampung Leuwigajah. Pada tanggal 21 Februari 2005, TPA Leuwigajah yang memiliki luas area mencapai 23,5 hektare yang penuh dengan sampah hingga ketinggian 35 meter setelah hujan deras tiba-tiba runtuh dan menimpa permukiman penduduk di bawahnya. Kampung Leuwigajah dan Batujajar lenyap. Sedikitnya ada 143 warga dua desa tersebut yang tewas di bawah timbunan sampah di TPA tersebut. Kunjungan Wapres waktu itu juga memicu demonstrasi besar-besaran yang menolak penggunaan TPA lebih lanjut.

Penanganan sampah dengan penimbunan juga menimbulkan masalah tersendiri apabila mekanisme pengangkutannya juga bermasalah. Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan sudah memiliki armada 70 buah truk kuning yang bekerja praktis tanpa henti. Sebagian pengusaha dan masyarakat juga menyumbang secara sukarela dengan menyediakan 20 truk sampah secara swadaya. Dalam beberapa kegiatan penting, Kodam III Siliwangi juga seringkali diminta untuk ikut mengangkut sampah ke TPA.

Tetapi tampaknya semua usaha itu belum berhasil menangani masalah sampah di Bandung dengan benar. Gagasan untuk menyediakan teknologi yang lebih baik berupa *incinerator* untuk menghancurkan sampah juga masih terkendala karena soal kekurangan dana dan karena persoalan birokrasi yang terbelit oleh korupsi dari dalam.

Untuk menyediakan TPA baru atau memperluas TPA di kawasan yang selama ini sudah disepakati, pemerintah kota Bandung menghadapi tantangan yang serius. Kendatipun upaya komunikasi politik antara kota Bandung dengan daerah sekitarnya sudah sering dilakukan, tidak ada jaminan bahwa kesepakatan dapat terlaksana. Pada bulan Mei 2006, misalnya, sejumlah warga memprotes agar kawasan TPA Pasirbajing di Kabupaten Garut ditutup dan tidak memperbolehkan lagi lingkungan sekitarnya sebagai tempat pembuangan akhir sampah dari daerah-daerah lain. Pasirbajing hanya mampu menerima 200 meter kubik sampah setiap harinya dengan armada truk dari PD Kebersihan sebanyak 22 buah. Tetapi dalam praktik sampah terus menggunung dan kemudian meluas ke kawasan permukiman warga.

Pertanyaan:

1. Uraikan masalah penanganan sampah padat (*solid waste management*) secara umum. Mengapa sampah di Bandung menjadi persoalan yang begitu serius dan pihak Pemda tidak bisa menanganinya dengan baik? Jelaskan.
2. Tunjukkan bentuk-bentuk konflik kepentingan yang terjadi diantara para perumus kebijakan dan unsur-unsur masyarakat dalam penanganan sampah. Jika Anda dalam kedudukan sebagai walikota Dada Rosada, apa alternatif yang terbaik untuk memecahkan masalah ini? Uraikan secara singkat peta dari berbagai kelompok kepentingan yang menentukan pemilihan alternatif kebijakan tersebut.
